

PENDIDIKAN ISLAM, GLOBALISASI DAN KEMISKINAN

M. Imam Zamroni

Abstract

The objective of this article is to describe the role of Islam education in global context, especially to solve several problems in Indonesia, for example, poverty, unemployment, natural disaster, social disorder, and other serious problems. Obviously, although they bring about some positive effects for development of this country, these problems are also effects of globalization. We are often trapped in economic discourse when discuss it and overruling other aspects such as ideological, cultural, and social; whereas, they are as important as economic discourse. In other words, globalization covers multi-aspects in our life, so that some of new obligations of Islam education are to answer various problems of Moslem life.

One of the contradictive issues is that globalization becomes a part of our life because we are a part of globalization. Therefore, we have to eliminate science dichotomy between

Lahir di Tuban, 06 Oktober 1982.

Menyelesaikan Madrasah Ibtidaiyah, 1994, Madrasah Tsanawiyah, 1997 pada Yayasan Salafiyah, Tuban Jawa Timur dan Madrasah Aliyah Manbaul Futuh, 2000. Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004 dan Program Master Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007. Bekerja sebagai peneliti Pusat Study Asia pacific (PSAP) UGM.

religion and science. Escaping from the pro and the contra Islam education claimed take able to answer the new problematic of Moslem life. The Moslem must be supported by life skills in order to survive in the face of the globalization. Summarily, we have to exchange classic paradigm with the modern one that is responsive to social problems, especially related to the religion

Keywords: *Islam education, globalization, poverty, religion*

Pendahuluan

Problematika yang dihadapi bangsa Indonesia semakin komplek, mulai dari kemiskinan, busung lapar, pengangguran, bencana alam, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), konflik horizontal, sampai pada krisis ekonomi yang bermetamorfosis menjadi krisis multidimensi dan mengakibatkan melambungnya harga kebutuhan pokok, yang mengakibatkan kondisi rakyat kecil semakin terjepit oleh keadaan yang tidak menentu. Ironisnya, kemiskinan saat ini terus meningkat, padahal negeri kita ini kaya akan Sum-

ber Daya Alam (SDA) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang tak luput dari pengamatan kita, akibat dunia yang semakin mengglobal, terdapat ketimpangan sosial (*social disorder*), antara negara-negara maju dengan negara dunia ketiga. Terutama pada sektor ekonomi, karena perdagangan bebas yang sudah digulirkan pada beberapa dekade terakhir. Meskipun negara dunia ketiga merasa belum siap dengan kebijakan tersebut, akan tetapi harus diterima dengan segala konsekuensinya. Kendala yang paling serius adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah.¹ Akibatnya mereka akan tetap berstatus sebagai negara terbelakang (*underdevelopment countries*) dengan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, seperti halnya yang dialami oleh Indonesia.

Perlu kita ketahui bahwa kemiskinan tidak memandang apakah mereka umat Islam atau non Islam, karena kemiskinan tidak disebabkan oleh suatu agama tertentu. Tidak satupun agama di dunia ini yang mengajak umatnya untuk hidup dalam keadaan miskin. Namun,

¹Terdapat dua modal utama untuk menunjang keberhasilan pembangunan, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lihat Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa* (Jakarta: Yayasan Obor, 1989) P.1-38. Namun tak bisa dipungkiri bahwa SDM yang berkualitas ternyata jauh lebih penting dibandingkan dengan SDA, karena SDM yang berkualitas akan lebih produktif dibandingkan yang kurang berkualitas.

dalam konteks ke-Indonesia-an, kemiskinan lebih disebabkan oleh 'belunggu' sistem yang sama sekali tidak berpihak pada mereka yang kurang beruntung atau lemah, seperti, petani dan nelayan, terutama dari segi modal, baik modal sosial (*social capital*), modal kultural (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*).² Terbukti pada bulan Oktober 2005 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM sampai $\pm 100\%$ ekses negatif yang ditimbulkan harga barang melaju searah dengan kenaikan BBM tersebut. Di beberapa daerah pesisir, nelayan juga sempat tidak mampu melaut, karena beratnya beban biaya operasional yang harus ditanggung.

Persoalan kemiskinan tidak hanya berimbas pada semakin menipisnya kemampuan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,

bahkan pada kondisi yang paling klinis tidak sedikit rakyat Indonesia yang mengkonsumsi nasi Aking -nasi sisa yang sudah dikeringkan dan kemudian dimasak kembali--sebagai konsumsi makanan sehari-hari.³ Inilah ironi kemiskinan di negeri yang kaya. Rasa empati umat Islam terhadap musibah yang melanda bangsa ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk ditumbuhkan, pada hakekatnya seluruh umat Islam di dunia ini adalah saudara (*al muslimû akhûl muslim*) yang diharapkan mampu membentuk satu-kesatuan yang utuh dalam solidaritas sosial keagamaan. Karena solidaritas sosial antar agama atau intra agama merupakan sarana yang paling ampuh untuk membangun integritas umat dalam menciptakan harmoni sosial.⁴ Dalam kehidupan umat beragama tanpa diiringi oleh usaha bersama untuk

²Pierre Bourdieu, *In Othre Words; Essays Towards a Reflexive Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1994), h. 127.

³Sampai saat ini angka kemiskinan mengalami peningkatan yang tajam, terutama akibat dari kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang mencapai $\pm 100\%$ dan inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya tidak sedikit warga Indonesia yang menderita busung lapar seperti yang terjadi di Yahukimo, NTB Aceh, bahkan sampai di Ibu kota Jakarta, juga dijumpai anak-anak yang menderita penyakit busung lapar.

⁴Hasan Hanafi mengatakan, perdamaian dan keamanan tidak dapat diwujudkan di dunia Islam lewat pendekatan kekuatan militer akan tetapi dapat diwujudkan melalui keterbukaan untuk mengakui bahwa Islam juga mempunyai hak untuk berekspresi secara legal dan merdeka. Lihat Hasan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2001), P. 320. Bandingkan dengan Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2005), hh. 178-184

menciptakan harmoni sosial, mustahil akan terciptakan integritas yang kokoh. Inilah bahaya sinkretisme keagamaan yang selama ini menjadi biang kerok konflik horizontal umat beragama. Sekarang, sudah tidak waktunya lagi untuk memperdebatkan fanatisme keagamaan, cobalah umat Islam untuk menanggulangi persoalan riil yang ada dalam masyarakat yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Penyelesaian masalah tersebut tentunya akan membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan terus berkonflik antar sesama. Bangsa ini sangat membutuhkan uluran

tangan yang tulus untuk mengentaskan kemiskinan yang terus melilit.

Di sisi lain, menumbuhkan kesadaran integratif-kolektif untuk menghadapi kompetisi global juga harus terus ditingkatkan. Sudah diketahui bersama, meskipun etos kerja umat Islam relatif tinggi, tetapi dalam menghadapi globalisasi kita tidak bisa bertindak secara individual.⁵ Karena globalisasi merupakan kekuatan *super power* yang akan merombak sistem tatanan dunia menjadi mengglobal.⁶ Batas-batas geografis antar negara menjadi kabur yang mendorong tingkat kompetisi yang semakin tinggi. Searus dengan hal persoalan tersebut, Peter

⁵Meskipun oleh banyak pihak segmen-segmen tertentu komunitas Islam Indonesia dianggap mempunyai etos kerja kewirausahaan yang tinggi, namun diakui atau tidak prestasi dunia usaha kalangan Islam mudah "dikalahkan" atau dinetralisasikan oleh pelaku-pelaku dunia usaha komunitas "lain". Lihat Bahtiar Efendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 203. Atau mengapa komunitas dagang santri atau pribumi tidak mampu berkompetisi --kalau tidak menggeser-- posisi dominan komunitas dagang, misalnya Cina? Padahal Clifford Geertz, dalam penelitiannya di Mojokuto, Kediri membuktikan bahwa pada masyarakat santri mempunyai kegairahan ekonomi atau etos kerja yang cukup tinggi. Lihat: Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).

⁶Searus dengan hal tersebut, Immanuel Wallerstein (1974): *The Modern World-System of capitalist Agriculture and The Origins of The European World-Economy, 1600-1750*, beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem yang saling terpisah. Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia atau *world empire*. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sebuah sistem politik yang dipusatkan. Lihat, Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 108

L. Berger (1990) mengatakan, bahwa kompetisi akan selalu melahirkan dominasi.⁷ Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bahwa umat Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun kemajuan bersama di era kompetisi global, terutama kiprah mereka dalam memengaruhi garis kemiskinan.⁸ Sebagai catatan, pengakuan diri sebagai saudara bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini merupakan modal sosial (*social capital*) yang akan melahirkan solidaritas sosial, sehingga kekuatan sosial untuk saling menopang persoalan sosial yang dihadapi umat menjadi lebih ringan.

Pendidikan Islam --perguruan tinggi, sekolah formal, pesantren tradisional, majelis ta'lim, "serikat tolong-menolong" seperti kelompok yasinan, majelis latihan semacam

pesantren kilat, dan majelis kultum (kuliah tujuh menit atau ceramah singkat⁹--merupakan media yang paling strategis dalam mengentaskan umat Islam dari jurang kemiskinan. Tidak sedikit pesantren yang membekali para santrinya dengan *life skills* agar mampu *survive*, hidup secara mandiri.¹⁰ Kita lihat misalnya, dalam setiap pesantren banyak memiliki Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) yang merupakan salah satu wahana pemberdayaan santri dan mengenal dunia perekonomian secara mandiri. Bahkan terdapat juga pesantren lingkungan yang membekali para santrinya dengan ketrampilan-ketrampilan yang bersifat teknis untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar pesantren tersebut, seperti bertani, berkebun, beternak dan lain sebagainya. Unikny para santri mem-

⁷Dalam catatan yang lain dia juga mengatakan bahwa kapitalisme industrial yang maju telah melahirkan, dan terus melahirkan, standar kehidupan material yang paling tinggi bagi sejumlah besar orang dalam sejarah umat manusia. Lihat Peter L. Berger, *Revolusi Kapitalis* (Jakarta: LP3ES, 1990), h.73

⁸Pada sektor lain gerakan Muhammadiyah, NU dan Kemitraan sudah menampakkan kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap keterpurukan bangsa ini. Dengan terbentuknya Forum Gerakan Moral Nasional Pemberantasan Korupsi yang didukung oleh pemerintah RI dengan berperan serta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi (*The UN Convention Against Corruption*) pada tahun 2003.

⁹Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), h. 250

¹⁰Sampai saat ini pesantren yang mengembangkan perekonomian melalui koperasi pondok pesantren (Kopontren) mencapai 4.158 kopontren dengan rincian 3,640 aktif dalam menyokong pendanaan pesantren dan pemberdayaan santri, dan 518 tidak aktif, yang lebih menggembirakan lagi yaitu dari beberapa pesantren tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.129 orang.

punyai kesempatan yang lebih leluasa untuk belajar di pesantren, jika dibandingkan dengan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun madrasah. Jelas, ke-trampilan ini tentu tidak didapatkan di lembaga lain, karena pesantren memiliki karakteristik tersendiri dalam mendidik para santrinya yang lebih mandiri. Ironisnya, eksistensi lembaga ini dibenturkan dengan berbagai isu terorisme yang menyudutkan lembaga pendidikan yang *genuine* di Indonesia ini. Meskipun diterpa badai politik internasional yang mendeskreditkan pesantren, lembaga ini tidak menampakkan pergeserannya dalam upaya mementaskan bangsa ini dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Isu tersebut juga dikukuhkan dengan, hadirnya Perguruan Tinggi Asing (PTA) merupakan bukti bahwa persaingan dalam dunia pendidikan juga semakin ketat. Dalam hal ini pendidikan Islam harus mampu memberikan upaya protektif terhadap derasny arus budaya

manca yang membanjiri bangsa Indonesia, sebagai umat Islam yang hidup di negara-negara berkembang, upaya protektif tidak berarti menutup diri dari transformasi sosial dan modernitas, tetapi berusaha untuk berpikir jernih, kritis dan selektif terhadap fenomena sosial budaya.¹¹ Tidak menutup kemungkinan hadirnya PTA tersebut sarat akan *westernisasi* (ke-barat-an) yang menjelma dalam lembaga pendidikan untuk melakukan *brain washing* (cuci otak) bangsa Indonesia dengan ideologi Barat, maka terjadilah “deideologisasi” neoliberal yang akan semakin menyengsarakan rakyat miskin dan memperlebar jurang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam konteks global, identitas umat Islam akan semakin kabur, maka revitalisasi Islam menjadi sangat urgen yang mampu membentuk identitas kolektif.

Dalam sektor pendidikan Islam, upaya pemberdayaan menjadi persoalan yang sangat urgen dalam memberantas kemiskinan yang

¹¹ Dalam upaya protektif terhadap arus budaya manca kita bisa menggunakan motto yang sering dilontarkan oleh warga Nahdliyin yaitu *Al muhafadlotu ala qodimis as sholih wal ahdlu bil jadidi al aslah* (melesterikan sesuatu yang masih baik dan relevan dalam perkembangan zaman, dan mengambil sesuatu yang lebih baik) artinya kita tidak secara hitam putih menilai globalisasi, namun mampu bersikap secara arif dan bijaksana. Lihat: Materi Pertanggungjawaban PB NU ke-31, Donohudan, Solo, 28 Novemver- 2 Desemebr 2004, h. 58

terus meningkat,¹² dengan berbekal *life skills* untuk mengarungi kehidupan terutama dalam menghadapi pertarungan yang semakin kompleks, akibat arus globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi, kita akan mempunyai senjata sekaligus kekuatan dalam mengarungi hidup. Oleh karena itulah, aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok Islam sebenarnya tidak patut dilakukan, karena hanya akan menghasilkan disintegrasi umat Islam, dan terkotak-kotak oleh friksi-friksi tersebut, yang berarti ruang gerak kita semakin sempit dan lemah. Akan tetapi yang harus dilakukan yaitu membekali umat Islam dengan pengetahuan, ketrampilan profesional dan, kemampuan adaptif untuk membentuk harmoni sosial atau integrasi umat menjadi satu kesatuan yang utuh. Tak bisa dipungkiri, percaturan politik inter-

nasional dan wacana yang bersifat kekinian menjadi persoalan yang harus diketahui bersama untuk melihat kemampuan diri sendiri dan mempersiapkan diri dalam mengarungi globalisasi. Yang harus diketahui bahwa globalisasi tidak hanya proses ekonomi saja tetapi juga proses politik, proses kultural, dan proses ideologi.¹³ Meskipun yang sering kita rasakan secara langsung adalah dampak ekonomi. Liberalisasi ekonomi secara tidak langsung telah menyudutkan negara-negara terbelakang (*under developed countries*) karena negara-negara tersebut tidak dilengkapi dengan sistem kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang kuat bagi rakyatnya.

Terlepas dari semua itu, globalisasi telah membawa sisi gelap dan sisi terang bagi negara-negara di dunia ketiga. Terbukanya kran globalisasi telah mendorong tingkat

¹² Jumlah penduduk miskin tahun 1976 menurut data BPS adalah 54,2 juta jiwa dan dengan perekonomian yang membaik jumlah orang miskin berkurang menjadi 21,5 juta jiwa pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997 mengakibatkan jumlah orang miskin naik drastis menjadi 79,4 juta jiwa, terdiri dari 21,6 juta jiwa penduduk kota dan 56,8 juta jiwa penduduk desa. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tentu akan menambah jumlah penduduk miskin. Diperkirakan di awal tahun 2000 dengan tolok ukur UMR dari BPS ini, jumlah orang miskin sudah mencapai 95,8 juta jiwa. Data tersebut memperlihatkan jumlah penduduk miskin yang tidak kecil dan ini adalah sebah ironi. Lihat: http://www.pu.go.id/DitjenSDA/ditjendesa/warta/Nov%20Des/jml_orang.htm

¹³ Malfred B. Steger menilai bahwa globalisasi tampaknya melahirkan peluang dan kekayaan yang sangat luar biasa bagi segelintir orang, dan menjerumuskan sebagian besar lainnya ke dalam kemiskinan dan kesengsaraan yang memilukan. Lihat Malfred B. Steger, *Globalisme; Bangkitnya Ideologi Pasar* (Yogyakarta: Lafadl Pustaka, 2005), hh. 30-59.

kompetisi yang semakin tinggi. Tak hanya itu, akses informasi pun menjadi semakin mudah. Hadirnya internet, televisi, media massa sebagai simbol bahwa sekat-sekat primordial antar bangsa dan negara menjadi semakin kabur. Bangsa suatu negara tertentu seolah-olah tidak dipisahkan oleh batas-batas geografis atau wilayah teritorial. Orang dapat secara langsung menyaksikan peristiwa penting di ujung dunia secara cepat melalui beberapa media yang tersebut di atas, yang lebih menakjubkan, jeda waktu dengan peristiwa sesungguhnya yang tidak terlalu jauh, meskipun mereka berada pada jarak ribuan mil bahkan jutaan mil. Ini berarti bahwa batas-batas geografis telah diterobos oleh *information technology* (IT) dan telah menjadikan manusia di dunia ini seolah-olah menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem global.

Di sisi lain, Globalisasi dengan konsep liberalisasi ekonomi yang telah menjanjikan kemakmuran di negara-negara sedang berkembang, juga menimbulkan krisis sosial. Globalisasi neoliberal yang ditopang oleh kapitalisme global telah menciptakan dua krisis, yaitu: krisis polarisasi kelas dan krisis lingkungan. Jika pembangunan dimaknai

sebagai perluasan ruang kebebasan manusia, globalisasi telah membuat hal itu semakin buruk, karena globalisasi telah membuat ketimpangan dan kemiskinan semakin luas melalui proses marginalisasi ekonomi politik. Pada skala ini pembangunan tidak lagi memadai jika hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diyakini selama ini. Persoalan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang didengungkan Islam selama ini, bahwa Islam memaknai pembangunan tidak hanya sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bersifat duniawi dan materialistik, namun lebih dari itu, dimensi *ukhrowi* juga mendapatkan porsi yang sama besarnya, bahkan lebih penting dari persoalan yang bersifat duniawi. Disisi lain Islam juga dikenal dengan sebutan agama yang *rahmatan li al alamin* (rahmat bagi seluruh alam) yang sudah ditegaskan dalam al Qur'an "*Tidak Kami utus engkau Muhammad selain menjadi rahmat bagi alam semesta*" (Al-Ambiya [21]: 107). *Kalian (umat Islam, seharusnya menjadi) sebaik-baik umat yang pernah dihidirkan untuk kemaslahatan segenap umat manusia...*" (Ali Imran [3] 110). Dengan kata lain, Islam tidak mengharapkan pembangunan yang timpang

atau berat sebelah. Singkatnya aspek *muâmalah* dengan aspek *ubu-dîyah* harus mendapatkan porsi yang seimbang.

Tak luput dari persoalan di atas, keberhasilan suatu pembangunan juga didasarkan pada pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tetapi akibat liberalisasi pasar, telah membentuk sebuah opini publik bahwa tolak ukur keberhasilan seseorang didasarkan pada kemapanan sektor ekonomi belaka.¹⁴ Heru Nugroho (2005) mengatakan, kapitalisme global tahap lanjut saat ini nafas hidupnya menggunakan dromologi (ilmu percepatan), baik dari cara memproduksi maupun mengkonsumsi. Artinya, bagaimana produsen memproduksi dengan cepat, mendistribusikan dengan cepat dan bagaimana konsumen mengkonsumsi dengan cepat dan demikian proses ini berulang secara kontinu.¹⁵

Tulisan ini merupakan paparan singkat tentang peran pendidikan Islam dalam mengentaskan kemiskinan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini sebagai akibat globalisasi yang tidak bisa dibendung lagi. Maka, pendidikan Islam dihadapkan pada tingkat kompetisi yang semakin kompleks, oleh karena penggunaan nalar klasik pendidikan Islam sudah seharusnya direkonstruksi, karena perkembangan zaman yang semakin cepat. Dalam dataran realitas empiris pendidikan Islam harus mempunyai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan yang semakin menggurita. Beberapa persoalan diatas yang coba didiskusikan dalam tulisan dingkat ini.

Dalam Pusaran Globalisasi

Berbicara tentang globalisasi tentu tidak bisa terlepas dari agen-agen internasional yang menyokong kedigdayaan globaliasi seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, *World Trade Organization*

¹⁴Persoalan tersebut searus dengan proposisi yang dikatakan Peter L Berger bahwa jika kita ingin melakukan modernisasi di bawah bentuk organisasi sosial ekonomi manapun (kapitalis maupun sosialis), maka kita mungkin harus mengatasi persoalan besarnya ketimpangan material. Jika kita ingin campur tangan secara politik agar penguasaan material lebih merata, maka pada akhirnya kita akan mengguncangkan mesin ekonomi kemakmuran dan membahayakan standar kehidupan material masyarakat. lihat: Peter L Berger, *Op. Cit.* h. 68

¹⁵Heru Nugroho, "Mawaspadai Lintah Darat Plastik." *KOMPAS*, 17 Januari 2005.

(WTO), *Asian Development Bank* (ADB), *International Bank for Reconstruction and development* (IBRD), *United Nations Development Program* (UNDP) dan lain sebagainya. Beberapa lembaga tersebut telah menyebar di seluruh pelosok dunia sebagai sarana implemenasi program-program yang telah dicanangkan dalam konteks global. Tak hanya itu, pada sektor ekonomi, tidak sedikit *Transnational Corporations* yang bercokol di negara-negara sedang berkembang untuk mengeruk sejumlah keuntungan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besar, akibatnya *under-developed countries* tersebut mengalami ketimpangan ekologis yang luar biasa seperti yang terjadi pada kasus masyarakat Papua akibat keberadaan industri *Freeport Mc Moran* yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar,

kasus lumpur porong Sidoarjo, Jawa Timur yang menyengsarakan ribuan warganya.¹⁶ Jika ini dibiarkan, dan pemerintah tidak mengambil tindakan secara tegas, maka persoalan ini tidak hanya akan menimpa masyarakat Papua dan Sidoarjo saja, namun seluruh bangsa Indonesia juga akan bernasib sama karena *Transnational Corporations* telah menempati posisi di seluruh wilayah Nusantara ini.¹⁷

Ironisnya, mau tidak mau, senang atau tidak senang, globalisasi sudah ada di depan mata dan harus diterima dengan lapang dada, bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (2005), mengatakan dalam suatu pidato kenegaraannya *'America is my second country'*. Secara tidak langsung, sebenarnya kita telah terjebak dalam kubangan globalisasi dengan konsekuensi-konsekuensi yang sangat merugikan

¹⁶Pada skala internasional, terdapat 20 TNCs terbesar yang telah tersebar di seluruh dunia diantaranya yaitu: Royal Dutch, Exxon, HSBC Holdings, General Electric, Unilever, Intel Corporation, Ford Motor, General Motors, Philip Morris, Toyota, British Petroleum, IBM, ENI, British Telecom, Lloyds/TSB, Novartis, Merck, Glaxo Wellcome, Microsoft, AT&T Corporation. Lihat makalah dalam perkuliahan S2 Sosiologi UGM oleh Prof. J Nasikun, 2006. Tidak diterbitkan.

¹⁷Dalam konteks ke-Indonesia-an, selain PT *Freeport McMoran* terdapat sejumlah Trans National Corporation yang sudah sejak dulu ada di Indonesia, seperti Coca Cola, Reebok, American Express, Citibank, Caltex, Mobil Oil, Exxon, dan Arco. Indonesia dianggap sebagai salah satu 'hot spot' yang harus mendapatkan perhatian penuh dari Amerika Serikat, mengingat Indonesia berpenduduk lebih dari 220 juta, kaya dengan sumber daya alam, letak geografis yang sangat strategis dan merupakan pasar bagi produk-produk Amerika Serikat. Lihat makalah perkuliahan S2 Sosiologi UGM, *Peranan Pihak Asing Dalam Proses Amandemen Konstitusi*, 2006. Tidak diterbitkan.

bangsa kita. Inilah yang bisa disebut dengan globalisasi sebagai proses ideologisasi, bahwa globalisasi tidak hanya bergerak pada sektor ekonomi itu sudah terbukti dengan peristiwa-peristiwa yang melanda bangsa Indonesia. Dalam hal inilah pendidikan Islam yang mempunyai dua orientasi --*duniawi* dan *ukbrowi*-- yang sangat strategis untuk melakukan upaya penyadaran (*conscientization*) bagi seluruh pemeluknya,¹⁸ Bahwa kehidupan di dunia tidak berhenti pada satu titik --kematian-- namun ada satu titik kehidupan yang lebih kekal --kehidupan di akhirat-- yang menjadi terminal akhir umat Islam di dunia ini.

Maka sangat disayangkan jika, kita sebagai umat Islam terjebak pada kungkungan globalisasi yang mengagung-agungkan kehidupan dunia. Tak ayal, upaya pemulihan ini dapat dilakukan dengan strategi kebudayaan dengan cara *counter discourse* (konter wacana), dengan merevitalisasi peran pendidikan Islam sebagai media pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan bagi

seluruh umatnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa secara kuantitatif penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, meskipun demikian, dalam kehidupan yang semakin kompetitif umat Islam menempati peringkat yang kurang menguntungkan karena persoalan-persoalan internal yang ada di tubuh umat Islam. Apalagi kebijakan-kebijakan internasional sekarang ini jauh dari harapan kita semua. Senada dengan persoalan itu. Joseph E Stiglitz (2002), mengatakan, globalisasi selain terus meningkatkan angka kemiskinan di dunia ketiga juga mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkompetisi.

Umat Islam sebenarnya mempunyai *social capital* dan sekaligus *cultural capital* yang luar biasa besarnya, bahkan Amirika sebagai negara adidaya saat ini mewanti-wantinya, jika integritas umat Islam mampu terbangun dengan baik. Oleh karena itulah, perlu diketahui bahwa, politik internasional pun turut mengintervensi dunia Islam agar terus terjadi konflik yang ber-

¹⁸ Paulo Freire, tokoh pendidikan Brazil, mengatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari proses penyadaran yang bersifat internal dan psikologis, dan perubahan-perubahan bagaimana individu-individu memahami dunia mereka, atau setidaknya aspek-aspek sosio-politik dunia mereka. Perlu ditegaskan bahwa perubahan-perubahan internal semacam itu memliki manifestasi eksternal yang signifikan. Lihat William A. Smith, *Conscientization; Tujuan Pendidikan Paulo Freire* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 11.

kepanjangan seperti saat ini yang sedang terjadi, konflik akibat karikatur Nabi Muhammad yang dimuat di beberapa media massa di Denmark, gerakan Islam fundamentalis yang meresahkan masyarakat akan terjadinya kekerasan, perang di Iran yang tak kunjung selesai, Afganistan yang terus dijadikan target pemberantasan terorisme, Irak yang tak pernah menemui suasana tenang, konflik di Ambon, konflik di Poso serta persoalan-persoalan lainnya.¹⁹ Persoalan-persoalaan kekianian itulah yang seharusnya dijawab oleh Islam sebagai agama yang berpredikat sebagai *rahmatan li al alamin*. Dari sinilah kita sebenarnya dituntut untuk melakukan koreksi diri (*self correction*) agar problem sosial terpecahkan.

Dari sinilah, pendidikan Islam dituntut mampu berperan untuk mengeliminir berbagai persoalan yang melanda dunia Islam. Pendidikan mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan profesional, maka optimalisasi dan kesatuan visi pendidikan menjadi agenda bersama agar dapat tercipta kohesifitas sosial umat Islam yang kokoh. Jika sejak awal generasi umat Islam dibekali dengan ilmu pengetahuan yang tinggi dan ke-trampilan yang tangguh, maka mereka akan semakin *survive* dalam mengarungi hidup yang semakin kompetitif. Kelemahan umat Islam selama ini adalah tidak adanya integrasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat Islam yang ideal.²⁰ Mereka mudah diombang-ambingkan oleh isu internasional

¹⁹Tidak hanya itu, kerusakan ekologis akibat kapitalisme global juga patut diperhitungkan, seperti halnya, semakin tingginya tingkat polusi, menipisnya lapisan ozon akibat pemanasan global, tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun, ketahanan tanaman pertanian yang semakin rapuh. Dari sinilah kita mengetahui bahwa logika yang dibangun oleh kapitalisme global adalah, menekan biaya produksi serendah mungkin dari pada melestarikan keseimbangan ekologis, yang kerusakannya tidak akan menjadi beban bagi perusahaan secara *financial*. Lihat: Andre Gorz, *Anarki Kapitalisme*, terjemahan (Yogyakarta: Resist Book, 2005), h. 5.

²⁰Problematika yang lebih serius, bahwa umat Islam juga memiliki keragaman yang terformulasikan dalam sekte-sekte yang tidak sedikit jumlahnya; FPI, Islam Jama'ah, Laskar Jihad, Hizbut Tahrir, Muhammadiyah, NU, LDII, dll, dimana seluruh kelompok tersebut mempunyai asumsi yang berbeda-beda terhadap Islam. Keragaman ini seharusnya dimaknai sebagai rahmat atau harta kekayaan atas khazanah pemikiran Islam yang tidak ternilai harganya, bukan malah sebaliknya, sebagai persoalan yang mendasari munculnya konflik horizontal dalam Islam itu sendiri. Keragaman tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk membangun integritas umat Islam dalam bingkai keragaman (*unity in diversity*).

yang tidak jelas asal usulnya, dan hanya sekedar upaya Barat untuk menciptakan “disintegrasi” umat Islam, maka sebuah upaya penyadaran menjadi penting dalam hal ini. Sehingga mampu meleraikan konflik internal Islam, dan menciptakan agenda yang lebih riil untuk mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan dan kemiskinan yang terus mengalami peningkatan.

Berkutat pada Nalar Klasik

Meskipun globalisasi terus berkembang dengan cepat akibat perkembangan teknologi, transportasi dan informasi, tetapi sampai saat ini masih ada kesan bahwa pendidikan Islam identik dengan *ke-jumud-an*, stagnan, dan konvensional. Kesan ini didasarkan fakta bahwa dewasa ini mayoritas umat Islam —terutama mereka yang tinggal di negara-negara dunia ketiga— hidup dalam serba keterbelakangan. Hal ini selain disebabkan derasnya arus globalisasi yang men-

dorong terjadinya ketimpangan dan juga diperparah oleh pola pikir yang dikotomis, antara ilmu Islam dan non Islam. Perbedaan antara ilmu dan agama tidak selayaknya dilakukan oleh umat Islam, karena keduanya dapat diorientasikan untuk meraih kehidupan *ukhrowi* yang lebih kekal.

Searus dengan itu Kuntowijoyo (2003) juga mengatakan bahwa Islam juga dipandang sebagai ilmu yang dapat dikaji secara ilmiah.²¹ Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kita harus mendikotomikan persoalan-persoalan yang ada di dunia, padahal Islam adalah agama yang sangat komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai bahan pertimbangan, Islam juga telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti, Ibnu Shina, Ibnu Rusd, Ibnu Khaldun, Al Ghazali, pada masa abad VIII, yang tentunya mereka tidak mempertentangkan sekulerisasi atau

²¹Secara garis besar, ada dua gagasan utama Kuntowijoyo, yaitu, pengilmuan Islam dan integrasi ilmu dengan etika. Meskipun pada tulisannya —tahun 80-an dan awal 90-an— ia tampak bersimpati pada gerakan Islamisasi ilmu, namun pada akhirnya dia membedakan gagasannya tentang pengilmuan Islam dari gerakan tersebut, bahkan mengatakan “gerakan Islamisasi ilmu mesti ditinggalkan”. Kuntowijoyo meyakini obyektivitas ilmu, namun menolak klaim bebas nilai, dalam artian netralitas/ketidakberpihakan. Di satu sisi, Islam mesti dijadikan ilmu (diobyektivikasi); di sisi lain, ilmu-ilmu (khususnya sosial) mesti menyatakan keberpihakan yang jelas kepada cita-cita profetik universal agama-agama, humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Lihat, Zainal Abidin Bagir, *Pengilmuan Islam Integrasi Ilmu Dengan Etika; Gagasan Kuntowijoyo*. Makalah Seminar “Apresiasi Hidup dan Pemikiran Kuntowijoyo.” UGM, Yogyakarta, 26 Mei 2005

dikotomisasi seperti yang sekarang terjadi.²² Dikotomisasi yang mem-benturkan antara agama dan ilmu telah membuat keduanya “lumpuh” dan “buta”. Albert Einstein (1879-1955) mengatakan bahwa ilmu tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Keduanya memang harus di satukan tanpa ada hal-hal yang membatasi. Pembatasan antara keduanya akan semakin mempersempit ruang gerak masing-masing.²³

Pola pikir dikotomis akan semakin memperdalam jurang pemisah antara wilayah agama dan ilmu. Padahal keduanya bagaikan satu tubuh yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Memang banyak orang yang beranggapan bahwa, wilayah agama hanya sebatas pada

“wilayah *ubudiyah*” saja—hubungan antara manusia dengan sang *Kholiq*-nya. Namun adalah suatu keharusan untuk memformulasikan ilmu-ilmu “sekuler” (baca: ilmu umum) menuju pada wilayah transendental. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa menafikan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, keduanya harus mempunyai *balance*, artinya antara *hablum minallâh* dan *hablum minannâs* terbangun secara sinergis. Perlu diingat bahwa Kecenderungan pemikiran polarisasi, lebih merupakan *mainstream histories* yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun kebenaran, misi, dan substansi ajaran Islam yang universal tentu tidak mengenal sekat-sekat kekinian dan kedidinesian.²⁴

²²Abuddin Nata mengatakan bahwa agar kehadiran agama (Islam) lebih fungsional bagi umatnya, maka pendekatan multidimensi (*multidimensional approach*) sudah seharusnya dilakukan. Problematika yang selama ini kita hadapi hanya memandang agama dari satu sudut pandang, sehingga beragama terasa ‘sempit’ atau bahasa ekstremnya agama malah menjadi belenggu bagi umatnya. Di antara pendekatan itu adalah pendekatan teologis normatif, antropologis, sosiologis, psikologis, histories, kultural, dan pendekatan filosofis. Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tth), hh.28-50.

²³Hebermas sebagaimana dikutip oleh Francisco Budi Hardiman, menguraikan konsep sekuler menjadi dua segmen yaitu (1). Lenyapnya kesohihan pandangan dunia dan obyektivikasi-obyektivikasi tradisional sebagaimana terungkap dalam mitos, agama, ritus, metafisika dan tradisi dan digantinya semua itu dengan sistem kepercayaan yang subyektif individual; dan (2) berubahnya legitimasi-legitimasi tradisional itu menjadi kritik atas dogmatisme tradisi dan penataan kembali unsur-unsur tradisi yang dibebaskan ke dalam bentuk hukum formal kaum borjuis. Lihat Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; menyingkap kepentingan pengetahuan bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Buku baik, 2003), h. 108.

²⁴Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik; Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 7;

Persoalan sejarah pendidikan Islam yang dikotomis tersebut mempunyai dampak yang semakin mempersempit pola pikir terhadap agama itu sendiri, dan mempersempit ruang kajian pendidikan Islam. Selain itu, dampak yang dirasakan umat Islam sampai sekarang yakni *pertama* adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep *Abdullah* dari pada *khalifatullah* dan *hablum minallah* daripada *hablum minannâs* telah mengakibatkan diabaikannya rumusan *khalifatullah* dalam rumusan pendidikan. *Kedua*, orientasi pendidikan yang “timpang” itu telah melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai pada persoalan metodologis, bahkan pada *tradition of learning*. Perlu diketahui bahwa kesalahan memahami metodologis akan berakibat pada kegagalan proses belajar mengajar. Dalam hal ini Amin Abdullah (2004), juga mengatakan bahwa keterpisahan tersebut hanya akan mencetak dan menelurkan ilmuan dan praktisi yang tidak berkarakter. Maka problem sosial yang

dihadapi bangsa ini seharusnya menjadi prioritas pemecahan.

Pendidikan Islam tidak boleh hanya memperdebatkan persoalan-persoalan *fiqhiyah* yang mungkin sudah sangat ketinggalan dalam konteks perkembangan zaman. Tetapi lebih lagi, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketidakadilan sosial, kerusakan ekologis dan problem sosial lainnya merupakan persoalan *riil* yang dihadapi oleh bangsa ini. Inilah yang harus “dijawab” oleh umat Islam. Penulis tidak berpretensi untuk mendeskreditkan umat Islam, tetapi lebih dari itu ingin menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bangkit dari ‘tidur panjang’. Kita perlu menengok historisitas masa keemasan Islam dan mengambil pelajaran, sehingga mampu bangkit kembali dalam membangun peradaban Islam, tidak hanya beromantisme klasik.

Menjawab Problem Sosial Kekinian

Meminjam istilah Anthony Giddens (2005), bahwa modernitas merupakan proyek besar yang tidak pernah selesai dan kemudian “di-

Lihat juga, Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2006), hh. 114-130.

tanggung” oleh pascamodernitas.²⁵ Teknologi menjadi “mesin” yang sangat tangguh dalam mempercepat proses perubahan sosial. Ini yang disebut oleh Heru Nugroho (2005), sebagai dromologi. Kehadiran teknologi menjadikan kehidupan di dunia ini semakin mudah, segala sesuatu dapat diperoleh dengan cepat, komunikasi juga dapat dilakukan lebih gampang. Sebagai contoh, seseorang yang berbicara lewat telepon dengan orang lain, yang mungkin berada di belahan dunia ini, lebih merasa dekat dengan orang lain yang jaraknya berjauhan daripada dengan individu lain yang tinggal di ruang yang sama. Namun disisi lain, kehadiran teknologi tidak selalu menciptakan kebaikan-kebaikan seperti yang selama ini kita rasakan. Terdapat *hidden agenda* (agenda tersembunyi) terhadap teknologisasi yang hanya menguntungkan kaum minoritas --kaum menengah ke atas-- yang diukur dari segi materi. Maka ilmu sosial humaniora menempati posisi yang sangat strategis dalam pengemba-

ngan teknologi.²⁶ Agar dampak sosial dapat direduksi dengan melakukan prediksi-prediksi empiris.

Melihat berbagai problematika yang terus berkembang dalam masyarakat --baik Islam maupun non Islam-- lalu terbersit sebuah pertanyaan yang menggelitik dalam benak penulis. Bagaimana umat Islam merespon --dan kemudian berupaya untuk mencari solusi-- problematika yang amat kompleks tersebut? Pertanyaan yang sangat singkat tersebut terasa sulit menelusuri jawaban dalam konteks kekinian. Sebuah tuntutan yang paling mendasar adalah merombak pola pikir umat Islam untuk tidak terus-menerus berkuat pada nalar klasik, perdebatan *nash-nash* agama yang tak kunjung tuntas maupun konflik antar kelompok agama yang berlatar belakang politis. Ironisnya, tidak sedikit orang yang mengesampingkan untuk bagaimana mengentaskan bangsa dari keterbupuran akibat krisis ekonomi yang multifaset. Padahal sudah menjadi pengetahuan publik bahwa beragama tidak hanya

²⁵ Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hh. 59-69. Searus dengan diskursus postmodern, George Ritzer (2005) juga mengulas secara mendetail tentang postmodern, terutama tokohnya, selain mengulas secara mendetail tentang gagasan-gagasan teori sosial postmodern. Lihat, George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

²⁶ Nasikun, *Peran Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Bagi Liberalisasi dan Humanisasi Teknologi* (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sajana, UGM, 2005), h. 5.

mengejar dimensi *ukhrowi* saja, tetapi dimensi *duniawi* juga menjadi bagian dari ritual keagamaan. Al Qur'an yang menjadi sumber hukum bagi umat Islam juga banyak membahas tentang aspek *muamalah*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa persoalan sosial terus berkembang semakin kompleks, inilah yang harus dijawab oleh pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas umat, membekali siswa-siswinya dengan *life skills* yang dibingkai dengan moralitas keagamaan yang santun. Sehingga terciptalah pemimpin-pemimpin yang jujur dan tidak korup. Korupsi merupakan penyakit sosial yang akut di tubuh bangsa Indonesia. Karena kebobrokan bangsa ini tak lain disebabkan oleh mental bangsa yang korup. Kebocoran dana terjadi di mana-mana, kita ambil contoh, kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kasus PT. Freeport, beberapa kepala daerah, seperti Bupati Blitar, Bupati Kediri, kasus beberapa eksekutif di pemerintahan pusat, dan lain sebagainya.

Sebagai agama yang sangat komprehensif --meliputi aspek *ubudiyah* dan aspek *muamalah*-- Islam mempunyai *the hidden power* karena memiliki basis umat mayoritas di negeri ini. Sebagai langkah

strategis institusi pendidikan yang berafiliasi pada agama Islam juga menduduki peringkat yang paling atas. Maka optimalisasi peran lembaga pendidikan Islam --baik formal, non formal, maupun informal-- untuk menjawab probelamtika yang kita hadapi merupakan tanggung jawab kita semua, khususnya umat Islam. Oleh karena itulah, umat Islam harus inklusif (terbuka).

Aspek penting lain yang harus digarap oleh pendidikan Islam adalah perombakan kurikulum untuk menjawab persoalan-persoalan yang aktual. Tentunya pendidikan Islam tidak hanya membahas persoalan-persoalan agama, tetapi lebih dari itu juga dituntut untuk melakukan *reinvention* (menemukan kembali) problem-problem kekinian dan kemudian mencari solusi dalam konteks. Tidak hanya itu, kita beragama pun selalu disesuaikan antara teks dan konteks. Bangsa kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah-ruah, namun juga tidak mengesampingkan ketimpangan ekologis. Umat Islam selalu dibimbing untuk beriman kepada Allah SWT, dengan melestarikan segala ciptaan-Nya. Oleh karena itu, keseimbangan ekologis merupa-

kan wujud dari imanensi seorang muslim untuk menduduki peringkat taqwa yang paling tinggi. Mencintai ciptaan-Nya sama dengan mencintai Allah sebagai pencipta alam semesta, inilah yang merupakan wujud dari imanensi seorang muslim. Skill profesional yang dibarengi dengan imtaq yang berkualitas, akan tercipta *insan kamil* (manusia sempurna) sebagai cita-cita umat beragama yang ada di dunia ini.

Dengan adanya justifikasi agama seperti yang penulis sebutkan di atas, seharusnya sudah tidak ada lagi umat Islam yang bermental korup, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat di-*dolimi* oleh Allah dan umat-Nya. Kita sudah sangat merindukan harmoni sosial di belahan Nusantara ini, maka lembaga pendidikan Islam sebagai suatu entitas yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan agama dan sosial kemasyarakatan mempunyai peran ganda menuntaskan persoalan agama dengan cara kontekstual dan memberikan solusi alternatif terhadap problema sosial yang terus berkembang semakin kompleks.

Catatan Penutup

Sebagai kata penutup, perlu penulis tegaskan bahwa, masalah-

masalah sosial yang muncul di masyarakat terus berkembang semakin kompleks, begitu pula dengan persoalan-persoalan agama, karena dua segmen tersebut searus dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Disinilah pendidikan Islam tuntutan berperan ganda, selain mampu menyelesaikan persoalan keagamaan yang bersifat kekinian juga dituntut untuk memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Dari sinilah kita, sebagai umat Islam, berharap dapat terwujud sebuah cita-cita ideal *insan kamil*. Profesional namun, tidak mengesampingkan nilai-nilai agama Islam.

Akibat globalisasi yang semakin mempertajam perbedaan antara kaum minoritas dan kaum mayoritas, bangsa ini juga dihadapkan pada persoalan yang amat serius, misalnya, kemiskinan yang terus bertambah, pengangguran terus meningkat, kriminalitas yang terjadi semakin kompleks, bencana alam semakin sering terjadi di berbagai tempat, dan lain-lain. Maka pendidikan Islam juga mempunyai peran yang sama dalam menciptakan solusi alternatif untuk memecahkan persoalan yang ada pada bangsa ini. Hal yang paling penting adalah merubah paradigma (*maenstream*)

pendidikan Islam, yang selama ini terkesan *jumud*, stagnan karena kurangnya inovasi-inovasi kreatif untuk menciptakan pendidikan Islam yang mampu merespon perkembangan zaman. Revitalisasi pendidikan Islam dalam kancah globalisasi menjadi sangat penting untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Ruang yang semakin mengglobal menuntut manusia yang untuk memiliki karakter yang melekat dalam setiap individu, karena identitas kian kabur

Solidaritas sosial menempati posisi penting, untuk menumbuhkan rasa empati antar sesama untuk membangun, baik dalam konteks intra agama maupun antar agama, karena persoalan bangsa yang kian serius. Dari sinilah dapat tercipta, kehidupan yang harmonis, rukun, damai, sejahtera, karena dilandasi oleh kepekaan sosial yang tinggi antar sesama. Dengan didasarkan pada nilai-nilai Islam tersebut di atas, maka problem sosial berupa kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia ini akan segera dapat teratasi. Oleh karenanya, marilah kita satukan niat, bulatkan tekad dengan gerakan kolektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia di dunia ini. *Wallahu a'lam bi as showaab.*

SUMBER BACAAN

- Abdullah, Amin (2004): *Design Pengembangan Akademik LAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-Atomistik ke Arah Integratif-Interdisiplinari*. Makalah Lokakarya Penyusunan Desain Keilmuan Integratif UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Asegaf, Abdurrahman (2004): "Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi," dalam *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Ed. Imam Machali dan Musthofa Yogyakarta, Ar-Ruzz.
- Azra, Azyumardi (2006): *Paradigma Baru Pendidikan Nasional; Rekonstruksi dan Demokrasi*. Jakarta, Kompas.
- Bagir, Zainal Abidin (2005): *Pengilmuan Islam Integrasi Ilmu Dengan Etika; Gagasan Kuntowijoyo*. Makalah Seminar Apresiasi Hidup dan Pemikiran Kuntowijoyo, UGM, Yogyakarta, 26 Mei
- Berger, Peter L. (1990): *Revolusi Kapitalis*, Jakarta, LP3ES.
- Bourdieu, Pierre (1994): *In Othre Words; Essays Towards a Reflexsive Sociology*, Cambridge, Polity Press.
- Budiman, Arief (2000): *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama (1997): *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, Departemen Agama.
- Efendi, Bahtiar (2001): *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta, Galang Press.

- Giddens, Anthony (2005): *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Geertz, Clifford (1989): *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Ritzer, George (2005): *Teori Sosial Post-modern*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Gorz, Andre (2005): *Anarki Kapitalisme*. Yogyakarta, Resist Book.
- Hardiman, Francisco Budi (2003): *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Pengetahuan bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta, Buku Baik.
- Hanafi, Hasan (2001): *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*. Yogyakarta, Jendela.
- Huntington, Samuel P. (2003): *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. Yogyakarta, Qalam.
- Kuntowijoyo (1991): *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung, Mizan.
- Madjid, Nurcholish (2005): *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta, Paramadina.
- PBNU (2004): Materi Pertanggungjawaban PB NU ke-31, Donohudan, Solo, 28 Novemver- 2 Desember
- Mas'ud, Abdurrahman (2002): *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik; Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. Yogyakarta, Gama Media.
- Nata, Abuddin (2000): *Metodologi Studi Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasikun (2005): *Peran Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Bagi Liberalisasi dan Humanisasi Teknologi*. Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Nugroho, Heru (2005): *Mawaspadai Lintah Darat Plastik*, dalam KOMPAS, 17 Januari 2005, hal. D
- Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU (2004): *Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama; Laporan Akhir Tahun PP LP Ma'arif NU masa Khidmat 1999-2004*. Jakarta, PP LP Ma'arif NU
- Pincus, Jonathan, R. (2004): *Membongkar Bank Dunia*. Jakarta, Djembatan.
- PRESMA UIN Sunan Kalijaga, *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi; Buah Pikiran Seputar, Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Sajogyo, 1989, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Jakarta, Yayasan Obor
- Smith, William A. (2001): *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Steger, Malfred B. (2005): *Globalisme; Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta, Lafadl Pustaka
- Stiglitz, Joseph E. (2002): *Globalization and Its Discontents*. London, Pinguin Books.
- Steenbrink, Karel A (1994): *Pesantren, Madrasah, Sekolah; Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta, LP3ES.
- Wibowo, I. (2001): *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*, Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, kerjasama dengan Internasional Forum on Globalization